



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pemalang, 15 November 2024
Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Pemalang

di-
Pemalang

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 900 / ~~2023~~ /BKD

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	1 (satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081998031003

- Tembusan :
- 1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
 - 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang.

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Telp. (0284) 321376 - Fax. (0284) 321502
Website : www.pemalangkab.go.id/bkd

EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang
©2024

KATA PENGANTAR

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang.

Tujuan evaluasi Renstra adalah untuk memastikan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. Hasil evaluasi Renstra ini, akan digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030, dimana apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BKD Kabupaten Pemalang akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan pada dokumen perencanaan selanjutnya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen Evaluasi Renstra ini, untuk itu kami sangat menghargai masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan BKD Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 15 November 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908-199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS	II-1
2.1. Persandingan Indikator pada Renstra dengan Indikator pada RPJMD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Kepmendagri turunannya	II-1
2.2. Capaian Kinerja	II-8
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	III-1
3.1. Faktor Pendorong	III-1
3.2. Faktor Penghambat	III-1
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	IV-1
4.1. Kesimpulan	IV-1
4.2. Rekomendasi	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matrik Persandingan Indikator Program pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Program pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	II-1
Tabel 2.2. Matrik Persandingan Indikator Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kegiatan Berdasar Permendagri 90 Tahun 2019	II-2
Tabel 2.3. Matrik Persandingan Indikator Sub Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Sub Kegiatan pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021	II-3
Tabel 2.4. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023	II-8
Tabel 2.5. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang	II-9
Tabel 2.6. Evaluasi Indikator Program BKD Kabupaten Pemalang	II-11
Tabel 2.7. Evaluasi Indikator Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang	II-14
Tabel 2.8. Evaluasi Indikator Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang .	II-19
Tabel 2.9. Evaluasi Indikator Kinerja Kunci BKD Kabupaten Pemalang	II-18
Tabel 3.1. RTP BKD Kabupaten Pemalang	III-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Evaluasi Renstra I-2

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra digunakan sebagai pedoman agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi Renstra merupakan salah satu dari siklus perencanaan pembangunan, yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Evaluasi Renstra digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang serta untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Apabila dalam evaluasi Renstra tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BKD Kabupaten Pemalang akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

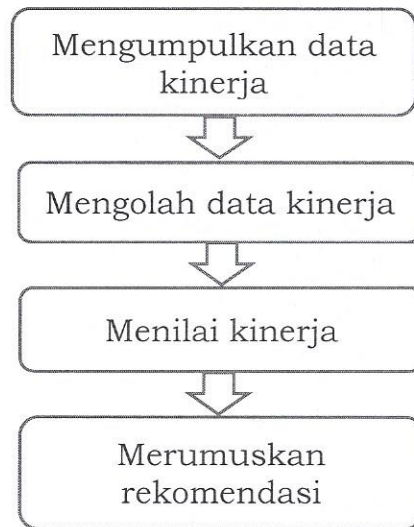
Evaluasi Renstra memuat informasi mengenai :

1. Capaian kinerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun menuju akhir periode;
2. Kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target akhir Renstra;
3. Relevansi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan situasi dan kondisi;
4. Program yang telah dilaksanakan, program yang belum terlaksana, dan penyebabnya;
5. Tindak lanjut yang harus dilakukan agar program yang belum terlaksana dapat terwujud.

Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja BKD Kabupaten Pemalang karena menjadi acuan untuk penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pemalang periode selanjutnya.

Evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data kinerja terkait evaluasi hasil pelaksanaan Renstra;
2. Mengolah data hasil evaluasi pelaksanaan Renstra;
3. Menilai kinerja, termasuk pencapaian target pelaksanaan Renstra;
4. Merumuskan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra.



Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Evaluasi Renstra

Dalam Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah : “Meningkatkan birokrasi kapabel” dengan sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN
2. Meningkatnya kinerja ASN
3. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN
4. Meningkatnya disiplin ASN

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dimana indikator program pada Renstra belum mengacu indikator program pada RPJMD dan indikator sub kegiatan belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga harus dilakukan persandingan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang adalah untuk menilai pencapaian dan efektivitas pelaksanaan Renstra dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan penyusunan evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Untuk mengukur nilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan 2023;
3. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen evaluasi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Capaian Kinerja Rencana Strategis, berisi tentang pelaksanaan Renja Tahun 2022-2023, evaluasi indikator tujuan dan sasaran, evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan, evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK).
3. Bab III Faktor Pendorong dan Penghambat, berisi faktor pendorong pencapaian target kinerja, penyebab tidak tercapainya target kinerja dan *lesson learned* penyusunan Renstra berikutnya.
4. Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS

2.1. Persandingan Indikator pada Renstra dengan Indikator pada RPJMD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Kepmendagri turunannya

Berdasar Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD. Namun, pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 belum mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sehingga harus dibuat persandingan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Persandingan Indikator Program pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Program pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

No	Program	Indikator pada Renstra	Indikator pada RPJMD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang	Nilai SAKIP
			Indeks Reformasi Birokrasi
2	Program Kepegawaian	Persentase mutasi, rotasi, promosi, dan pengembangan ASN	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
			Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
			Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
			Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
			Persentase layanan administrasi kepegawaian
			Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Selanjutnya perlu dilakukan juga persandingan indikator kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan indikator berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Persandingan Indikator Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kegiatan Berdasar
Permendagri 90 Tahun 2019

No	Kegiatan	Indikator pada Renstra	Indikator Berdasar Permendagri 90 Tahun 2019
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
9	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian
10	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)
11	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya
			Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)
12	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN
			Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)
			Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Persandingan selanjutnya adalah indikator sub kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan indikator sub kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Matrik Persandingan Indikator Sub Kegiatan pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Indikator Sub Kegiatan pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan/triwulan /semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
19	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan
20	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
29	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang dibeli	Jumlah paket bahan/material yang disediakan
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam satu tahun	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan
34	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli	Jumlah paket mebel yang disediakan
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
36	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah buku yang dibeli	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya
45	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
47	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jasa aset tak berwujud yang dipelihara	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
49	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
50	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
51	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
52	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN
53	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
54	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
55	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah kegiatan evaluasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN
56	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi lembaga profesi	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi
57	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola (modul, MBps, record, record)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian
58	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen elektronik, jumlah ID card dan kartu pegawai, jumlah kegiatan penghitungan TPP, jumlah tata naskah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian
59	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, jumlah evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
60	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah
61	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN
62	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN
63	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK, jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya
64	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti assessment	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center
65	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
66	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan
67	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen kerjasama, jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat
68	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan

No	Sub Kegiatan	Indikator pada Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	Indikator pada Kepmendagri Nomor : 050/5889 Tahun 2021
69	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN
70	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
71	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
72	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN
73	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional
74	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN
75	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina
76	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dan jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir
77	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional
78	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
79	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
80	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
81	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan
82	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah tanda jasa yang diusulkan	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa
83	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
84	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan khusus, keg, dok cuti, lhkpn)	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan
85	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
86	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani
87	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN

2.2. Capaian Kinerja

2.2.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berdasar Renstra BKD Pemalang Tahun 2021-2026, BKD Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan berupa “Meningkatkan birokrasi kapabel” yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Realisasi indikator ini di tahun 2023 sebesar 65,53 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 64,85 sehingga tingkat capaiannya sebesar 101,05%.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2023 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih tinggi, dengan rincian di tahun 2022 IP ASN Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi yaitu sebesar 54,46. Namun, di tahun 2023 dengan berbagai upaya perbaikan, Kabupaten Pemalang dapat mencapai nilai ASN yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 65,53.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Perbandingan IP ASN Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2023

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
Rata-rata		63,79	58,24	55,61	53,43	47,7	55,75	58,58	57,96

Sumber: IP ASN BKN, 2022 dan 2023

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN Provinsi Jawa Tengah serta rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori “rendah”, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk mewujudkan tujuan BKD Kabupaten Pemalang dirumuskan 4 (empat) sasaran, meliputi :

- 1. Meningkatnya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN;
- 2. Meningkatnya kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN;
- 3. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN;
- 4. Meningkatnya disiplin ASN yang diukur dengan indikator persentase tingkat disiplin ASN.

Berikut target serta capaian tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5
Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran BKD Kabupaten Pemalang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Realisasi		Capaian (%)		Capaian Target Akhir	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%	Status
Meningkatkan birokrasi kapabel	IP ASN			Indeks	64,35	64,48	64,61	64,85	65,1	65,34	65,59	51,63	65,53	79,91	101,05	99,91	ST
		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase kompetensi ASN	%	57,2	57,2	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4	32,2	36,9	56,29	64,17	63,18	R
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	72,23	83	89,95	103,36	103,36	ST
		Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	59,6	50,1	50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	48,32	83,48	95,49	163,37	158,71	ST
		Meningkatnya disiplin ASN	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	100	100	100,30	100,30	100,30	ST

Indikator tujuan dan sasaran diatas sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKD Kabupaten Pemalang. Berdasar tabel 2.5, di tahun 2022 dari 5 (lima) IKU BKD Kabupaten Pemalang hanya 1 (satu) indikator yang melebihi target, yaitu persentase tingkat disiplin ASN, sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat 4 (empat) indikator yang melebihi target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase kompetensi ASN. Nilai persentase kompetensi ASN diperoleh dari mengkonversi nilai IP ASN dimensi kompetensi IP ASN BKN. Nilai IP ASN dimensi kompetensi diperoleh dari jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibandingkan jumlah total ASN. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi diperoleh dari data bukti kegiatan pengembangan kompetensi yang diupload di SIMPEG.

Adapun penyebab indikator persentase kompetensi ASN tidak mencapai target adalah :

1. ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tidak meng-upload sertifikat di SIMPEG.
 2. Masih rendahnya anggaran untuk pengiriman peserta pengembangan kompetensi.
- Upaya yang dilakukan BKD Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kompetensi ASN antara lain :
1. Menghimbau agar perangkat daerah mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri dan meng upload bukti kepesertaan di SIMPEG.
 2. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan MOOC (Massive Open Online Course).

Sedangkan terhadap target akhir Renstra, posisi 5 (lima) indikator tujuan dan sasaran atau IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu IP ASN, persentase kinerja ASN, persentase tingkat pendidikan dan persentase tingkat disiplin ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status rendah (R), yaitu persentase kompetensi ASN.

2.2.2. Capaian Kinerja Program

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja berupa :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Program Kepagawaian dengan indikator kinerja berupa :
 - a. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
 - b. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
 - c. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
 - d. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
 - e. Persentase layanan administrasi kepegawaian
 - f. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
 - g. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

Berikut target serta capaian program yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.6
Evaluasi Indikator Program BKD Kabupaten Pemalang

Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Realisasi		Capaian (%)		Capaian Target Akhir	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%	Status
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	60,26	60,30	60,35	60,40	60,45	60,50	60,55	61,55	63,1	101,99	104,47	104,21	ST
	IRB	Indeks	50,83	50,91	50,99	51,00	51,45	51,80	51,90	54,62	-	107,12	-	105,24	ST
Program Kepegawaian	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	3,95	20,57	109,72	555,95	514,25	ST
	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya	%	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,94	5,49	183,75	322,94	274,50	ST
	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	0	21,65	0	1.273,53	1082,50	ST
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	82,29	95,00	82,29	95,00	95,00	ST
	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	67,00	80,00	67,00	80,00	80,00	T
	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	62,50	65	70	75	80	85	90	97,40	98,65	139,14	131,53	109,61	ST

Berdasar tabel 2.6, di tahun 2022 dari 9 (sembilan) indikator program BKD Kabupaten Pemalang terdapat 6 (enam) indikator yang melebihi target, yaitu nilai SAKIP; IRB; persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya; persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi; dan persentase tingkat kedisiplinan ASN. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat 6 (enam) indikator yang melebihi target dan 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yaitu IRB, persentase layanan administrasi kepegawaian dan persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan. Di tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak mengadakan evaluasi RB sehingga nilainya 0. Untuk indikator persentase layanan administrasi kepegawaian tidak mencapai target yang telah ditentukan disebabkan terdapat layanan yang tidak mencapai target, yaitu pemberian tanda jasa. Selanjutnya untuk indikator persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan juga tidak mencapai target disebabkan terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum selesai dibuat yaitu SIM manajemen talenta.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 9 (sembilan) indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu nilai SAKIP; IRB; persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya; persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi; persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya; persentase layanan administrasi kepegawaian; dan persentase tingkat kedisiplinan ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan.

2.2.3. Capaian Kinerja Kegiatan

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.
5. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator jumlah paket administrasi umum perangkat daerah.
6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan.
7. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.
9. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN);
 - b. Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian.
10. Kegiatan mutasi dan promosi ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN;
 - b. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN).
11. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN dengan indikator :
 - a. Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya;
 - b. Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya;
 - c. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional.
12. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan indikator :
 - a. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN;
 - b. Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai;
 - c. Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN.

Berikut target serta capaian kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.7
Evaluasi Indikator Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2022	2023		%	Status
1	Perencanaan, dan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	41	8	8	8	9	8		8	8	100	100	16	39,02	SR
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	144	29	29	29	29	28		26	26	89,66	89,66	52	36,11	SR
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	10	2	2	2	2	2		1	1	50	50	2	20	SR
5	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah	paket	360	72	72	72	72	72		36	36	50	50	72	20	SR
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	unit	68	12	14	14	14	14		4	20	33,33	142,86	24	35,29	SR
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	240	48	48	48	48	48		36	36	75	75	72	30	SR
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	595	119	119	119	119	119		86	94	72,27	78,99	180	30,25	SR
9	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN)	dokumen	2.040	408	408	408	408	408		428	612	104,9	150	1.040	50,98	SR
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian	dokumen	15	3	3	3	3	3		3	4	100	133,3	7	46,67	SR

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023	%	Status
10	Mutasi promosi ASN dan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	dokumen	25	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	10	40	SR
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN)	dokumen	10	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	4	40	SR
11	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya	orang	600	120	120	120	120	120	173	288	144,17	240	144,17	461	76,83	T
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	orang	750	150	150	150	150	150	122	3	81,33	2	81,33	125	16,67	SR
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional)	dokumen	15	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	6	40	SR
12	Penilaian evaluasi aparatur dan kinerja	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN	dokumen	75	15	15	15	15	15	8	1	53,33	6,67	53,33	9	12	SR
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai)	orang	3622	722	725	725	725	725	1010	620	139,89	85,52	139,89	1630	45	SR
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN	dokumen	115	23	23	23	23	23	12	135	52,17	586,9	52,17	147	127,8	ST

Berdasar tabel 2.7, di tahun 2022 dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan, terdapat 9 (sembilan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 9 (sembilan) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2023, dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 8 (delapan) indikator yang tidak memenuhi target. Tidak terpenuhinya target disebabkan banyak sub kegiatan yang telah direncanakan tidak diambil akibat terbatasnya anggaran.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 18 (delapan belas) indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu jumlah dokumen pengelolaan disiplin.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya.
3. Terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR), yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah; jumlah paket administrasi umum perangkat daerah; jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan; jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN); jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian; jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN); jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya; jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional; jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN; dan jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan adalah untuk 5 (lima) tahun dan yang sudah terlaksana baru 2 (dua) tahun, sehingga banyak capaian dibawah 40% (masuk dalam kategori sangat rendah).

2.2.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Berdasar Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
19. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
20. Pemindahan Tugas ASN
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
29. Penyediaan Bahan/Material
30. Fasilitasi Kunjungan Tamu
31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
33. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34. Pengadaan Mebel
35. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
37. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
39. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
42. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
45. Pemeliharaan Mebel
46. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
47. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
48. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
50. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
51. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

52. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
53. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
54. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
55. Evaluasi Pemberhentian ASN
56. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
57. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
58. Pengelolaan Data Kepegawaian
59. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
60. Pengelolaan Mutasi ASN
61. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
62. Pengelolaan Promosi ASN
63. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
64. Pengelolaan Assessment Center
65. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
66. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
67. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
68. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
69. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
70. Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
71. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
72. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
73. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
74. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
75. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
76. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
77. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
78. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
79. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
80. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
81. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
82. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
83. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatu
84. Pembinaan Disiplin ASN
85. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
86. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
87. Evaluasi Disiplin ASN

Berikut target serta capaian sub kegiatan yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.8
Evaluasi Indikator Sub Kegiatan BKD Kabupaten Pemalang

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%		Status	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	11	2	2	2	3	2		2	2	100	100	4	36,36	SR
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1		1	1	100	100	2	40	SR
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	60	12	12	12	12	12		12	12	100	100	24	40	SR
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
					2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026		2026	2026
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	24	40	SR
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	2	40	SR
13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	24	40	SR
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	2	40	SR
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	2	40	SR
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
19	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
					0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
20	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	4													0	SR
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	350	70	70	70	70	70	100	65	100	92,86			135	38,57	SR
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	280	56	56	56	56	56	0	0	0	0			0	0	SR
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0			0	0	SR
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0			0	0	SR
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR
29	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0			0	0	SR
30	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	60	12	12	12	12	12	100	12	100	100			24	40	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
				2026														
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	8	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
34	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	15	3	3	3	3	3	4	20	133,33	666,6	24	160	160	160	ST
36	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	24	40	40	40	SR
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	24	40	40	40	SR
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	24	40	40	40	SR
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	200	40	40	40	40	40	33	38	82,5	95	71	35,5	35,5	35,5	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	200	40	40	40	40	40	35	38	87,5	95			73	36,5 SR
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100			2	40 SR
45	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	100	20	20	20	20	20	0	0	0	0			0	0 SR
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	75	15	15	15	15	15	15	15	100	100			30	40 SR
47	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0			0	0 SR
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	2	2	2	2	2	2	2	100	100			4	40 SR
49	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0			0	0 SR
50	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100			2	40 SR
51	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	10	2	2	2	2	2	1	1	50	50			2	20 SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
52	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	laporan	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
53	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	dokumen	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
54	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	2.000	400	400	400	400	400	425	610	106,25	152,5	1035	51,75	R		
55	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
56	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
57	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	2	100	200	3	60	R		
58	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
59	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	laporan	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
60	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		
61	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	dokumen	10	2	2	2	2	2	1	1	50	50	2	20	SR		
62	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	20	4	4	4	4	4	4	4	100	100	8	40	SR		
63	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	600	120	120	120	120	120	173	288	144,17	240	461	76,83	T		
64	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	1	100	100	2	40	SR		

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target							Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	2022	2023		%	Status
65	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
66	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	orang	750	150	150	150	150	150	122	3	81,33	2	16,67		125	16,67	SR
67	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat	dokumen	15	3	3	3	3	3	1	1	33,33	33,33			2	13,33	SR
68	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	orang	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
69	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	laporan	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
70	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	orang	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
71	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	dokumen	10	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
72	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional ASN	orang	75	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
73	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
74	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	dokumen	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
75	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	orang	25	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	SR
76	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	orang	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target						Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s/d 2023	Capaian Target Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023				
														%		Status	
77	Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
78	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
79	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	65	13	13	13	13	13	8	1	61,54	7,69		9	13,85	SR
80	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
81	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	3.000	600	600	600	600	600	947	457	157,83	76,17		1404	46,8	SR
82	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang	500	100	100	100	100	100	50	143	50	143		193	38,6	SR
83	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	dokumen	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR
84	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	150	30	30	30	30	30	34	30	113,33	100		64	42,67	SR
85	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	100	20	20	20	20	20	12	135	60	675		147	147	ST
86	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	dokumen	125	25	25	25	25	25	13	20	52	80		33	26,4	SR
87	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	laporan	15	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	SR

Berdasar tabel 2.8, di tahun 2022 dari 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2023, dari 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tidak memenuhi target. Tidak terpenuhinya target disebabkan banyak sub kegiatan yang telah direncanakan tidak diambil akibat terbatasnya anggaran.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 87 (delapan puluh tujuh) indikator sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dan jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T), yaitu jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya.
3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status rendah (R), yaitu jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
4. Terdapat 82 (delapan puluh dua) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR).

Capaian yang sangat rendah ini disebabkan target yang ditetapkan adalah untuk 5 (lima) tahun dan yang sudah terlaksana baru 2 (dua) tahun, sehingga banyak capaian dibawah 40% (masuk dalam kategori sangat rendah).

2.2.5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) IKK pada urusan kepegawaian. Berikut target serta capaian IKK yang dilaksanakan BKD Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.9
Evaluasi Indikator Kinerja Kunci BKD Kabupaten Pemalang

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Realisasi Capaian		% Capaian Target RPJMD		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	%	Status
	Kepegawaian														
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	110,81	110,81	115	120	125	130	135	70,36	182,66	61,18	152,22	135,30	ST
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,27	5,27	6	7	8	9	10	11,9189907	3,68	198,65	52,52	36,76	SR
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1	1	2	3	4	5	6	100	100	5000,00	3333,33	1666,67	ST

Berdasar tabel 2.9, di tahun 2022 dari 3 (tiga) IKK, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar. Sedangkan di tahun 2023, dari 3 (tiga) IKK, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai dan melebihi target, namun masih juga terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu rasio pegawai fungsional, hal ini disebabkan masih rendahnya minat PNS untuk menjadi fungsional.

Terhadap target akhir Renstra, posisi 3 (tiga) IKK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST), yaitu rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar dan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi.
2. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR), yaitu rasio pegawai fungsional.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.1. Faktor Pendorong

Dalam pelaksanaan kinerja BKD Kabupaten Pemalang terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan kinerja tersebut, meliputi :

1. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD.
2. Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/Kementerian/Lembaga.
3. Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN.
4. Adanya manajemen talenta dan sistem merit yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.
5. Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN.
6. Adanya pendampingan dari lembaga/ kementerian terkait.
7. Adanya regulasi yang memuat sanksi bagi pelanggar disiplin ASN.
8. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
9. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, faktor-faktor pendorong tersebut harus dimanfaatkan digunakan dengan optimal agar pencapaian kinerja juga dapat optimal.

3.2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kinerja BKD Kabupaten Pemalang, meliputi :

1. Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
2. Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
3. Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
4. Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tidak melengkapi data kepegawaian dan capaian kinerja.
5. Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN.
6. Terdapat kebutuhan/fitur baru yang harus termuat dalam sistem kepegawaian.
7. Masih terdapat ASN yang melanggar aturan disiplin ASN.
8. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis sampai level individu.
9. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Agar faktor penghambat tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja, harus dirumuskan upaya-upaya pengendalian yang termuat dalam dokumen Manajemen Risiko. Adapun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan BKD Kabupaten Pemalang adalah :

Tabel 3.1
RTP BKD Kabupaten Pemalang

No	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
a	b	c
1	Membuat surat himbauan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang agar mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri yang dilengkapi dengan bukti penyelenggaraan (sertifikat)	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
2	Membuat surat himbauan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang agar memerintahkan jajarannya mengupload bukti keikutsertaan/sertifikat pengembangan kompetensi yang diikuti ke aplikasi SIMPEG	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
3	Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang nilai dimensi kompetensi IP ASN nya rendah	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
4	Membuat surat pemberitahuan kepada ASN Kabupaten Pemalang agar melaporkan kinerjanya di aplikasi e-kinerja BKN setiap triwulan	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
5	Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang ASN nya belum melaporkan kinerjanya di aplikasi e-kinerja BKN	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
6	Menginformasikan kembali kepada seluruh perangkat daerah mengenai beasiswa, program tugas belajar dan ijin belajar	Kepala BKD Kabupaten Pemalang
7	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi secara mandiri	Sekretaris
8	Menyusun kebijakan pengelolaan risiko tahun 2024	Sekretaris
9	Menyusun kebijakan pengelolaan risiko tahun 2025	Sekretaris
10	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari evaluator SAKIP	Sekretaris
11	Secara bertahap disediakan kelengkapan sarana prasarana yang mendukung operasional server SIMPEG seperti genset yang otomatis aktif ketika listrik padam	Kabid PPIK pada BKD Kabupaten Pemalang
12	Penambahan personil pada tim yang bertugas mengupdate data kepegawaian secara realtime	Kabid PPIK pada BKD Kabupaten Pemalang
13	Melaksanakan lobi kembali kepada instansi penyelenggara diklat agar Kabupaten Pemalang diprioritaskan dalam penyelenggaraan diklat	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
14	Melakukan pembinaan kepada ASN fungsional tertentu hasil penyederhanaan birokrasi setelah berkonsultasi kepada kementerian/instansi terkait	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
15	Mengajukan nota dinas penambahan anggaran di Perubahan APBD untuk kegiatan pengembangan SDM	Kabid PA pada BKD Kabupaten Pemalang
16	Menyelenggarakan sosialisasi tentang Disiplin ASN	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
17	Melaksanakan sosialisasi kembali mengenai pengisian e-kinerja BKN sekaligus cara penilaian dan evaluasi kinerja bawahan	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
18	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang predikat kinerja ASN nya diatas ekspektasi dan dibawah ekspektasi	Kabid DKA pada BKD Kabupaten Pemalang
19	Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan Assessment Center	Kepala UPT Penilaian Kompetensi

Diharapkan dengan dilaksanakan RTP tersebut, faktor penghambat dapat ditangani sehingga kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan capaian Renstra BKD Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan tahun 2023, masih terdapat indikator baik IKU, indikator kegiatan maupun sub kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra selanjutnya, yaitu :

1. Penyusunan Renstra harus selaras dengan RPJMD.
2. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan harus berdasarkan kebutuhan dan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut pasti akan dilaksanakan.
3. Penentuan target harus berdasarkan capaian periode yang lalu dan perkiraan capaian berdasarkan sumber daya yang ada.
4. Penyusunan Renstra harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, sehingga dapat dirumuskan RTP nya dan RTP tersebut dimasukkan dalam dokumen Renja untuk diberikan alokasi anggaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

BKD Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Agar pelaksanaan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber pendanaan serta sarana prosarana secara efektif dan efisien.

Dengan berdasar uraian dan data-data yang telah disajikan, maka kinerja BKD Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - a. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status rendah (R)
2. Capaian Indikator Program
 - a. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
3. Capaian Indikator Kegiatan
 - a. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
 - c. Terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)
4. Capaian Indikator Sub Kegiatan
 - a. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status tinggi (T)
 - c. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status rendah (R)
 - d. Terdapat 82 (delapan puluh dua) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)
5. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 - a. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan status sangat tinggi (ST)
 - b. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat rendah (SR)

Masih adanya indikator dengan capaian rendah (R) dan sangat rendah (SR) menuntut BKD Kabupaten Pemalang harus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sehingga capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra selanjutnya adalah :

1. Penyusunan Renstra harus selaras dengan RPJMD.
2. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan harus berdasarkan kebutuhan dan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut pasti akan dilaksanakan.
3. Penentuan target harus berdasarkan capaian periode yang lalu dan perkiraan capaian berdasarkan sumber daya yang ada.
4. Penyusunan Renstra harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, sehingga dapat dirumuskan RTP nya dan RTP tersebut dimasukkan dalam dokumen Renja untuk diberikan alokasi anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4 /3419/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, diperlukan Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, perangkat daerah menyusun Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
25. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Pematang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Pematang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
31. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Evaluasi Rencana Strategis; dan
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Evaluasi Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pemula Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188,4/340 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala BKD Kabupaten Pemalang	Pengarah	
2.	Sekretaris BKD Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan BKDKabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKD Kabupaten Pemalang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003